

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu				
		Pidana	100%	100%	100%	100%
		Perdata	100%	100%	100%	100%
		Tipikor	100%	100%	100%	100%
		2. Persentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi				
		Pidana	51%	51%	51%	51%
		Perdata	41%	41%	41%	41%
		Tipikor	26%	26%	26%	26%
		3. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	95%	95%	95%
Indeks Persepsi Anti Korupsi	97%	97%	97%	97%		

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
Indikator : Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu									
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara.	Penegakan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp183.322.000
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah Perkara yang lebih dari 3 bulan	Penegakan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlakasnya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara tidak melebihi 3 bulan	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Penegakan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara yang sudah melebihi batas waktu	Penegakan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi									
1.	Menyusun Putusan Perkara Tingkat Banding yang berkualitas	√	√	√	√	Putusan perkara tingkat banding yang berkualitas	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp183.322.000
2.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama.	√	√	√	√	Terdatanya perkara pidana, perdata dan tipikor yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
Indikator: Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan									
1.	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi	√	√	√	√	Terbentuknya Tim Survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp15.399.007.000
3.	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi	√	√	√	√	Job Description Tim SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
4.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi	√	√	√	√	Jadwal dan Perangkat SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	

5.	Melaksanakan SKM dan SPAK (secara manual atau menggunakan aplikasi)	√	√	√	√	Kuesioner SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
6.	Mendata dan merekap hasil SKM dan IPAK	√	√	√	√	Data Hasil SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
7.	Menyusun Laporan Hasil SKM dan SPAK			√		Laporan SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
8.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey			√		Laporan tindak lanjut hasil survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
		Pidana	100%	100%	100%	100%
		Perdata	100%	100%	100%	100%
		Tipikor	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
Indikator : Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu									
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp183.322.000
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e- doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6	Mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan putusan ke SIPP.	√	√	√	√	Dokumen Salinan putusan dan Tanggal Salinan putusan.	Program Dukungan Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Palu, Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



Dr. Hj. NIRWANA, S.H.,M.Hum